

HIZBUT TAHRIR

PERJUANGAN MENEGAKKAN KHILAFAH

Respon Masyarakat Terhadap Hizbut Tahrir Cabang Jambi

Sayuti³

Abstract : *Khilafah is viewed as the most ideal form of Governance and leadership for islamic society. For almost thirteen centuries, khilafah has united Islamic society whole the world by its glorious institution and civilization progress. The abolishment of khilafah appeared a big protest in whole Islamic world especially from Islamic figures which come from in and outside Turkish who contra of kemal. One of movement which is still exist to struggle for khilafah is Hizbuttahrir. It was established in 1952 in Bait al Maqdis Yerusalem and it was spread in every provinces in Indonesia including jambi. It works by embracing the public figure, thinking of government side and joining with the intellectuals. However they still thought khilafah is too idealism and hard to realize.*

Kata Kunci : *Khilafah, Hizbut Tahrir, perjuangan.*

LATAR BELAKANG

Bagi hizbut Tahrir, Penegakan khilafah selalu menjadi tema besar. Sebagai sebuah gagasan, khilafah adalah sesuatu yang besar. Pasaunya, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim di seluruh dunia. Tegaknya khilafah inilah yang saat ini menjadi cita-cita besar kaum muslimin di seluruh dunia di tengah terkuaknya borok-borok peradaban kapitalisme global dan keinginan kaum muslimin untuk membangun ideologi alternatif: ideologi Islam, sebagaimana ideologi lain (Kapitalisme sekular maupun sosialisme-komunis), jelas tidak mungkin tampil kecuali diusung oleh sebuah negara. Khilafah itulah pengembangan ideologi Islam ke depan (Al-Wa'ie No. 85, 2007 : 2).

3 Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Arif Rahman Hakim.

Jika ditarik mata rantai sejarah khilafah ke belakang, maka penghapusan sistem khilafah oleh Kemal Attaturk, didasari oleh amarah dan semangat rakyat Turki untuk membela tanah air. Dalam pada itu Yunani yang ingin mengembalikan kejayaan lama pada tanggal 19 Mei 1919 mendarat di Izmir, dengan dibantu oleh kapal perang Inggris, Prancis dan Amerika. Tanah yang sudah ratusan tahun dipandang sebagai tanah air oleh orang Turki, hendak dirampas oleh bekas jajahan. Dalam suasana inilah muncul Mustafa Kemal, seorang pemimpin Turki dari penjajahan Eropa (Harun Nasution, 1987 : 142).

Reformasi Politik Mustafa Kemal yang paling menonjol adalah ditumbangkannya sistem kekhalifahan yang telah bertahta selama berabad-abad dalam dunia Islam dan diganti dengan republik.

Jabatan Khalifah dibubarkan oleh Kemal Ataturk atas keputusan Majelis Nasional Agung . perdebatan berjalan dengan sengit, tetapi akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924, suara di majlis memutuskan penghapusan jabatan Khalifah. Khalifah terakhir, Abdul Majid diperintahkan meninggalkan Turki, dan ia bersama keluarganya pergi ke Swiss (Harun Nasution, 1975 : 151).

Pembaharuan yang dilakukan Mustafa Kemal didasarkan pada pemikiran westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme. Namun demikian menurut Harun, pembaharuan (sekularisme) yang dilakukan oleh Kemal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan agama Islam dari masyarakat Turki, dan Mustafa Kemal memang tidak bermaksud demikian. Yang ia maksud ialah menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan.

Bukan hanya Turki yang terkena pengaruh westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme, akan tetapi semua negara Islam dengan beberapa sisi perbedaan. Yang jelas tidak satupun di antara negara-negara Islam memproklamirkan diri sebagai negara khilafah. Menurut Munawir (1990), republik Indonesia dan sebagian besar negara-negara Islam yang ada di dunia sekarang ini sama-sama mengikuti pola politik Barat, dengan adaptasi dan penyesuaian, dan sama dalam hal, selain dalam bidang perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, sistem hukum di negara-negara tersebut

tidak sepenuhnya bersumberkan hukum Islam. Satu-satunya perbedaan konstusional antara negara kita dan negara-negara itu adalah dalam konstitusi mereka secara jelas Islam dinyatakan Islam sebagai agama negara, sedangkan negara kita berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama (Sjadzali, 1990 : 236).

Di sisi lain reaksi terhadap runtuhnya tahta khilafah muncul dalam bentuk gerakan yang berkelanjutan. Gelombang kemarahan umat Islam dilancarkan dengan berbagai protes terhadap rezim militer Turki baik secara individu maupun secara kelompok. Salah seorang tokoh yang secara individual melancarkan protes terhadap rezim militer Turki adalah Rasyid Ridha. Dalam nota protesnya itu, Ridha mengusulkan kepada rezim militer Turki agar masalah pemerintahan di Turki diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat, yang selanjutnya diberi tugas untuk mempelajari persoalan khilafah. Akan tetapi usulan ini tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari rezim militer.

Di tengah perhatian umat Islam tertuju sepenuhnya pada upaya mengembalikan sistem khilafah, mereka dikejutkan oleh tindakan Syarif Husein di Hijaz yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah dunia Islam pengganti khalifah di Turki. Tentu saja, proklamasi sepihak Syarif Husein ini tidak mendapatkan dukungan dari umat Islam, terutama di Mesir yang ketika itu motor gerakan mengembalikan sistem khilafah.

Harus diakui bahwa ada arus pemikiran yang cukup kuat yang berkembang di kalangan internal umat Islam saat itu untuk mengembalikan pusat kekhalifahan di dunia Islam ke Arab, setelah Turki menghapuskannya. Argumentasi yang digunakan adalah bahwa sebelum kekhalifahan itu diambil alih oleh Turki, pusat pertumbuhan dan kemunculannya adalah di Arab. Bagi orang Mesir. Pusat kekhalifahan itu tidak hanya harus dikembalikan ke Arab, melainkan lebih dari itu, Mesirlah yang paling berhak mendapat kehormatan dijadikan sebagai pusat kekhalifahan. Mereka merasa, Mesir lebih maju dari negara Arab manapun. Banyak kaum cerdik pandainya, dan yang terutama adanya kenyataan bahwa Mesir menjadi

motor gerakan mengembalikan sistem khilafah di dunia Islam. Atas pertimbangan ini, maka ada kesepakatan dikalangan aktivis gerakan mengembalikan sistem khilafah, untuk mengadakan muktamar yang secara khusus membahas upaya mengembalikan sistem khilafah. Rencananya muktamar ini akan diadakan pada bulan Maret 1925 di Mesir. Proposal mengenai rencana kegiatan muktamar kemudian diserahkan kepada raja Mesir pertama yang memulai penggunaan gelar "*Malik*". Gelar "*Malik*" (raja) itu ia pergunakan sejak tahun 1922.

Raja Puad I ternyata tidak bisa memberi izin bagi upaya penyelenggaraan muktamar Islam tersebut, karena pertimbangan beratnya tanggung jawab sebagai penyelenggara muktamar. Akan tetapi, setelah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyelenggaraan muktamar itu mendapatkan persetujuannya. Disamping itu, ada juga kekhawatiran arena muktamar akan dimanfaatkan untuk memberi dukungan terhadap Syarif Husein yang telah memproklamirkan dirinya sebagai khalifah Dunia Islam. Akhirnya muktamar Mesir 13 – 19 Mei 1926, berakhir dengan kegagalan. Karena banyak dan kuatnya pertentangan diantara peserta muktamar, akhirnya tidak dapat tercapai kesepakatan. Para peserta menurut Munawir, terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok *pertama* mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul Majid (Turki) yang sudah dilucuti oleh Mustofa Kemal dari segala kekuasaan, dan menghendaki dia dikembalikan kepada jabatan khalifah. Kelompok *kedua* mendesak agar mengakui kekhilafahan Syarif Husein, yang pada tahun 1916 memberontak terhadap kekuasaan Turki dan menyatakan dirinya sebagai khalifah. Sedangkan kelompok *ketiga*, yang umumnya terdiri dari ulama Mesir, berusaha keras agar muktamar Raja Puad dari Mesir sebagai khalifah.

Sebaliknya Syarif Husein, yang saempat menguasai Hijaz, Jedah, Mekah, dan Madinah pada akhir tahun 1926 dapat dikalahkan oleh keluarga Al-Sa'ud dengan semangat doktrin wahabi. Syarif Husein dan keluarganya berdasarkan perjanjian yang antara dia dengan Abdul Aziz atas prakarsa Inggris sebagai mediator harus meninggalkan Hijaz menuju Aden dan selanjutnya menuju Irak dimana saudaranya

Raja Paisal Ibnu Husein berkuasa (Ahmed Assah, 1996 : 51). Dengan demikian Syarif Husein kehilangan segala haknya sebagai raja, apalagi sebagai khalifah.

Upaya untuk menghidupkan kembali lembaga khalifah tidak terhenti sampai disini. Tidak lama setelah kongres di Mesir, pada 1 Juni 1926 Raja Ibn Saud di Hijaz memprakarsai muktamar yang sama. Mukatamar di Mekah, ini menunjukkan ada persaingan antara raja Puad di Mesir dan raja Ibn Saud di Hijaz. Minimal keduanya terobsesi menduduki jabatan khalifah. Dalam muktamar kali ini muslim Nusantara diwakili oleh H.O.S Tjokroaminoto dan K.H. Mas Mansur. Dalam laporannya, Tjokroaminoto mengatakan muktamar baru merumuskan tata tertib muktamar. Setahun kemudian, 1927, diadakan muktamar kedua di Mekah. Muslim Nusantara diwakili oleh Haji Agus Salim. Dalam kongres kedua ini juga gagal membentuk jabatan khalifah. Dalam pertemuan tersebut Umat Islam semakin realistis dengan perkembangan situasi sosial politik. Dan lambat laun perhatian umat terhadap masalah khalifah semakin menurun.

Dari segi pemikiran dan wacana mengenai masalah khalifah, tetap saja terus berlanjut, terutama dilakukan dan dikemukakan para tokoh antara lain Syekh Hasan Al-Bana, Sayyid Qutub, Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana A.A. Al-Maududi (Sjadzali, 1990 : 1).

Yang paling menarik perhatian penulis dalam kaitannya dengan upaya menghidupkan kembali lembaga khilafah adalah "Hizbut Tahrir". Betapa tidak, pada tanggal 12 Agustus 2007, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mengambil tempat di Gelora Bung Karno berhasil mengadakan perhelatan besar Konfrensi Khilafah Internasional (KKI), dihadiri lebih kurang 100 ribu orang dari dalam dan luar negeri. Meskipun tidak sempurna, para pembicara dalam acara KKI tempo hari tetap masih bisa disebut mewakili komponen umat Islam. Tokoh nasional yang menyampaikan orasinya antara lain : KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Prof. Dr. Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah/Wakil Ketua Umum MUI), Ketua Umum Syarikat Islam/Sekretaris MUI KH. Amrullah Ahmad, Ketua Umum MUI Sumatera Selatan KH. Drs. Thahlon Abdul Rauf,

dan tokoh Nahdiyyin dari Lombok Nusa Tenggara Barat Tuan Guru M. Turmuzi Badaruddin (Al-Wa'ie no. 85, 2007 : 3).

KKI 2007 mengalami peningkatan sangat dahsyat dari sisi jumlah yakni dihadiri 100 ribu orang, karena peserta yang hadir pada KKI tahun 2000 di tempat yang sama hanya 5000 orang. Keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia semakin terasa karena mereka sangat aktif melancarkan gelombang protes dan unjuk rasa menentang kebijakan dan isu yang dipandang menghina dan merugikan umat Islam.

Dalam rangka perjuangan menegakkan lembaga khilafah, HTI terus melebarkan sayap organisasinya di Indonesia, sampai dengan tahun 2006 HTI sudah berdiri di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, meskipun di sisi lain mendapat kecaman dan tekanan dari berbagai pihak yang kontra. Sejak bulan Agustus 2006 sudah berdiri pula HTI cabang Jambi dan Kuala Tungkal, tentu saja dalam rangka ikut berjuang menegakkan negara khilafah, sebuah tema besar yang senantiasa menggeliat, tersendat, tapi tak pernah usai sejak digulirkan setelah dihapuskan oleh Kemal Attaturk 1924. Untuk mengetahui dan memahami perjuangan HTI Jambi dalam upaya menegakkan khilafah dapat dilacak melalui studi literatur dan penelitian di lapangan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep khilafah menurut Hizbut Tahrir
2. Bagaimana perjuangan Hizbut Tahrir Cabang Jambi dalam upaya menegakkan khilafah
3. Bagaimana peluang dan hambatan yang dihadapi Hizbut Tahrir Cabang Jambi dalam upaya menegakkan khilafah.
4. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Jambi terhadap keberadaan Hizbut Tahrir di Kota Jambi?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui konsep khilafah menurut Hizbut Tahrir
2. Untuk mengetahui upaya-upaya Hizbut Tahrir Cabang Jambi dalam perjuangan menegakkan khilafah.
3. Untuk mengetahui peluang-peluang dan hambatan yang dihadapi Hizbut Tahrir Cabang Jambi dalam upaya menegakkan khilafah.

4. Untuk mengungkapkan pandangan masyarakat kota Jambi terhadap keberadaan Hizbut Tahrir di Kota Jambi.

MANFAAT PENELITIAN

Sumbangan informasi bagi instansi pemerintah terkait untuk lebih mengenal konsep khilafah menurut Hizbu Tahrir dan perjuangan Hizbut Tahrir Cabang Jambi dalam upaya menegakkan khilafah.

Sumbangan pemikiran bagi HTI Jambi dalam menata dan mengembangkan kegiatan. Sumbangan informasi bagi masyarakat luas untuk lebih memahami aktivitas Hizbut Tahrir dalam perjuangannya menegakkan khilafah.

METODOLOGI

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau sumber sebagai langkah pertama kali dilangsungkan dengan metode penggunaan bahan dokumen. Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumentasi, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 1998 : 149). Metode ini dapat berlangsung karena ditemukan sumber-sumber tertulis, terutama mengenai konsepsi khilafah menurut Hizbut Tahrir, yang banyak dituangkan dalam majalah "Al-Wa'ie dan buletin "Al-Islam" yang diterbitkan dan diedarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Sementara itu berbagai buku yang berisikan konsep-konsep Hizbut Tahrir mengenai berbagai masalah daulah khilafah, dapat diperoleh dengan mudah dalam bentuk copy plash disk pada pengurus Hizbut Tahrir.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode observasi, terutama terhadap kegiatan-kegiatan HTI Jambi dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Selain observasi, dilakukan juga teknik wawancara terhadap pengurus anggota HTI Jambi, dan dalam kasus tertentu digunakan wawancara mendalam (depth interview) untuk mengungkap aspek-aspek yang memerlukan penjelasan yang lebih terurai dan mendalam.

Selain observasi dan wawancara, untuk mendapatkan data mengenai respon masyarakat umum yang terdiri dari pedagang, petani dan kalangan profesi digunakan metode angket.

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, dilakukan dengan menggunakan *snowball sampling*, seperti dikemukakan Faisal (1990). Sampling itu harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) subjek telah cukup lama dan menyatu dengan medan aktivitas yang diteliti, 2) subjek terlibat secara penuh atau aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian, 3) subjek mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk informasi, 4) subjek yang pada mulanya asing kemudian dapat menjadi tempat pengalaman baru.

Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yakni Ketua HTI Jambi, dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan lebih menguasai, memahami dan mengalami segenap aktivitas HTI Jambi. Dalam proses *snow-ball sampling*, Informan ini bertambah menjadi 13 orang. Ini didasarkan pada saran informasi kunci yang pertama (*key informan*) dan pertimbangan peneliti sendiri, mengingat yang ditetapkan itu adalah bagian dari pengurus dan anggota yang aktif dalam kegiatan-kegiatan HTI Jambi, yang diperkirakan memenuhi syarat untuk memberikan pandangan dan penilaian tentang upaya dan kegiatan HTI Jambi dalam rangka ikut berjuang menegakkan khilafah.

Untuk mendapatkan data yang terpercaya dilakukan teknik triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain (Moleong, 2004, 330). Dalam penelitian ini teknik triangulasi dilakukan dengan cara pertama, membandingkan hasil observasi, wawancara, dan angket atau sebaliknya; kedua, dengan membandingkan apa yang dikatakan pelaku kepada peneliti dan kepada orang lain; dan ketiga, dengan membandingkan pendapat seseorang dengan berbagai pendapat orang lain atau dengan teori. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan terhadap data-data

dokumentasi dilakukan pemeriksaan dan pengecekan secara kontinu pada setting sosial yang diteliti.

TEKNIK ANALISA DATA

Analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan Faisal (1990) yakni terdiri dari empat langkah sebagai berikut: 1) analisis domain; 2) taksonomi; 3) komponensial; 4) tema kultural. Pemilihan langkah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk dapat memahami fokus penelitian harus diawali dengan pengetahuan dan pemahaman secara relatif menyeluruh tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam kaitan ini analisis domain terutama ditujukan memahami Hizbut Tahrir secara umum yang meliputi sejarah berdirinya, tujuan, ide-ide dan konsepsi, serta tokoh-tokoh Hizbut Tahrir. Setelah mendapatkan pengertian umum tentang Hizbut Tahrir, langkah berikutnya adalah taksonomi, yaitu analisis yang lebih rinci tentang suatu persoalan, yaitu analisis yang lebih rinci dan mendalam tentang fokus yang ditetapkan pada batas domain tertentu yang menjadi sasaran penelitian. Taksonomi disini diarahkan pada pembahasan mengenai konsepsi khilafah menurut Hizbut Tahrir, diikuti dengan upaya dan perjuangannya dalam mengembangkan organisasi dan gagasan-gagasannya.

Langkah berikutnya adalah analisis komponensial. Analisis ini dilakukan terhadap data-data yang cukup banyak dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan suatu pembahasan yang lebih khusus atau mendapatkan kesimpulan terhadap data-data yang ditemukan pada analisis domain dan taksonomi dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Analisis ini dimaksudkan agar lebih mudah menemukan dan mengidentifikasi suatu permasalahan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dilapangan.

Setelah melakukan analisis komponensial, kegiatan berikutnya adalah analisis tema kultural, yakni menentukan tema-tema yang keberadaannya termanifestasi atau menjelma secara khas dari kawasan keseluruhan atau sejumlah domain. Analisis tema ini

gagasannya bertumpu pada asumsi bahwa keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagian. Situasi sosial dan budaya apapun yang kita teliti, dalam pernyataan bukanlah sekedar jumlah dari permasalahan-permasalahan aktivitas, pelaku, tempat, dan fasilitas yang ada dalam situasi tersebut, ia merupakan kesatuan yang terpola dalam suatu keseluruhan (Arikunto, 2004 : 105).

Melalui analisis tema diupayakan mencari "*benang merah*" yang dapat mengintegrasikan lintas domain yang ada.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hizbut Tahrir (Nakata: 2007) adalah salah satu gerakan politik di antara kelompok-kelompok Islam yang tergabung dalam Islami Salafi- Sunni. Ajaran Islam itu sendiri mempunyai beberapa level. Level paling rendah secara umum dapat dipahami oleh seluruh kaum Muslim. Namun, level tertinggi merupakan argumentasi khusus yang hanya diajarkan oleh Hizbut Tahrir.

Sebagai gerakan sunni, Hizbut Tahrir percaya bahwa kepemimpinan politik tidak didasarkan pada penunjukan yang ditetapkan di dalam wahyu (perintah langsung dari Allah) yang diterima oleh seseorang. Namun, berdasarkan pemilihan umat Islam Sendiri.

Sebagai gerakan Sunni-salafi, gerakan ini mengacu pada pemaknaan secara langsung dari ayat-ayat al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Tanpa mengacu pada mazhab-mazhab Sunni yang terlebih dahulu ada (seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

Sebagai gerakan sunni-salafi, gerakan ini menolak segala benuk gagasan sosial politik yang berasal dari luar Islam tetapi murni sebagaimana yang diajarkan oleh para *salaf salih* (para generasi salih terdahulu) baik nilai-nilai tradisional dari masa pra Islam yang bertentangan dengan Islam maupun konsep modern dari Barat, sebagai dasar ideologis dari perubahan.

Di atas level (Islami, Sunni, salafi, islahi) ada satu seruan khas yang melekat pada Hizbut Tahrir, ayitu seruan *tahriri* (pembebasan) yang menjadi level tertinggi di antara berbagai level sebelumnya. Level seruan *tahriri* (pembebasan ini merupakan inti doktrin khilafah).

Setiap level dibangun berdasarkan level yang ada di bawahnya. Contoh: agar menjadi Sunni seseorang harus menjadi muslim, agar menjadi salafi seseorang harus sunni, agar menjadi seorang islahi, seseorang perlu perlu menjadi salafi dan agar menjadi seorang tahriri, seseorang harus menjadi islahi terlebih dahulu.

Karena itu sangat sulit bagi kaum muslim Syi'ah untuk menerima ideologis Hizbut Tahrir secara menyeluruh, ataupun menjadi bagian dari gerakan ini tanpa meninggalkan ajaran syi'ahnya. Mereka harus terlebih dahulu menerima ajaran sunni, lalu ajaran salafi, kemudian ajaran Islahi, dan terakhir adalah tahriri.

Namun doktrin khilafah pemahaman yang melekat erat pada pandangan Hizbut Tahrir dan merupakan inti dari pandangan ini, tidak diperuntukan terbatas hanya pada kaum islahi saja, namun juga untuk mereka yang ada pada pada level lain.

Konsep Khilafah Hizbut Tahrir

Al-khilafah menurut al-Faruqi adalah tatanan sosial yang merupakan aktualisasi dari kemauan Allah terhadap kaum Muslim. Sesuai kemauan Tuhan, manusia diwajibkan mengatur diri mereka sendiri dan memakmurkan bumi ini sebaik mungkin dalam kerangka ilahiah, membangun kebudayaan dan peradabandan menambah nilai limpah bagi kosmos. Dan karena itu baik pola Tuhan maupun aktualisasinya dalam sejarah bersifat individual dan komunal, rohani dan jasmani, internal dan eksternal, maka kaum Muslim harus mengorganisasi diri mereka secara bersama-sama; menegakkan suatu sistem untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia, untu menyelesaikan perselisihan secara adil, dan mewujudkan tujuan Tuhan di dunia di dalam sejarah (Al-Faruqi, TT: 58)

Dari kerangka filosofis inilah al-faruqi kemudian beranjak kepada syariah. Menurutnya, pembentukan khilafah mempunyai justifikasi yang kuat dalam syariah. Sebaliknya khilafah itu sendiri harus berdasarkan syariah. Para fuqaha telah merumuskan berbagai ketentuan fiqhiyah yang harus dihormati dan ditegakkan oleh negara. Tanpa negara tepatnya khilafah unsur-unsur syariah mungkin tidak dilaksanakan; mengabaikan syariah dapat berarti meninggalkan agama secara keseluruhan yang berarti murtad (Quran 5:44).

Adapun Konsepsi khilafah menurut pemahaman Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut:

1. Khilafah adalah satu-satunya sistem politik Islam yang sah.
2. Khilafah adalah pemerintahan berdasarkan hukum syariah Islam dan dijalankan melalui kepemimpinan yang dipilih oleh umat Islam.
3. Hanya ada satu khilafah yang berdiri di seluruh dunia.
4. Menegakkan khilafah adalah kewajiban umat Islam.
5. Cara untuk menegakkan pemahaman tentang konsep ini kepada mereka yang berkuasa dan memberikan kewenangan kepadanya untuk menjalankan hukum syariah, ketika menjadi *Darul Harb* dan seluruh peninggalan kekhalifahan telah sirna. (Ibid: 42)

Menurut Hasan Ko Nataka konsep ini bisa dipahami bersama, bahkan oleh seluruh lapisan muslim sunni tradisional. Sebab konsep khilafah Hizbut Tahrir tidak bertentangan dengan konsep khilafah dari mazhab-mazhab sunni. Hanya saja, doktrin sunni tidak secara eksplisit atau hanya secara implisit saja mengemukakan sistem ini.

Akan tetapi Yusuf Qordawi (Qardhawi, 89: 2003) mengkritik konsep Hizbut Tahrir dan menganggap konsep mereka ini sebagai seolah-olah “para penanti negara Islam” yang dipimpin oleh seorang khalifah atau kaum muslimin atau amirul mukminin, seolah-olah tidak ada jihad melawan musuh, sampai berdiri negara. Tak ada aksi perbaikan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam bentuk pengobatan orang sakit, penyantunan yang kelaparan, pemeliharaan anak yatim, ataupun penyadaran yang tersesat. Bahkan mereka memandang berbuat kebaikan menambah luka-luka melipur orang kelaparan dan menghapus air mata mereka yang bersedih sebagai hambatan bagi dakwah Islam. Dan perlu ditunda sampai berdirinya negara Islam. Mereka menolak keras para pegiat dakwah yang menyibukkan dirinya dengan aktifitas-aktifitas di luar dakwah.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berargumen:

1. Sesuai dengan perintah Allah swt berbuat kebajikan pada hakikatnya merupakan bagian tugas seorang muslim (Q.S. Al-Haq) : 77-78.
2. Berbuat baik termasuk bagian dari penyebaran dakwah Islam

juga. Sebab penyebaran dakwah tidak hanya berbentuk ceramah, ucapan dan tulisan semata, lebih baik menebarkan cinta dengan melakukan amak baik kepada orang lain, berbuat kebajikan kepada mereka sehingga hati mereka terbuka karena cinta.

3. Harus disadari tidak semua komponen gerakan Islam mampu menyebarkan dakwah lewat lisan maupun tulisan. Karena memang bakat dan kemampuan manusia berbeda-beda. Sehingga tidak heran bila kita menemui banyak orang yang mampu melakukan kerja sosial, ternyata tidak mampu melakukan kerja intelektual, kerja jebudayaan maupun dakwah. Maka lebih baik bila mereka diserahi tugas yang sesuai dengan kecakapan serta pengamalan mereka daripada dibiarkan larut dalam kekosongan, sehingga akhirnya membuat mereka bosan, melarikan diri ataupun putus asa.
4. Ada tujuan jangka panjang, sekaligus tujuan utama dalam bentuk mendirikan masyarakat Islami dan pemerintahan islami. Yang selayaknya menjadi prioritas perhatian dan perjuangan. Sekalipun memang terdapat tujuan –tujuan antara yang mungkin diwujudkan dengan usaha yang lebih kecil, tana mempengaruhi tujuan-tujuan utama tersebut.

Dari ungkapan di atas, jelaskan bahwa sebenarnya Yusuf Qardhawi menganggap bahwa konsepsi tentang khilafah merupakan tujuan jangka panjang.

Konsep Hizbut Tahrir sendiri memiliki lima level yaitu (1) Islam, (2) Sunni, (3) Salafi, (4) Islahi, (5), Tahriri. Namun kenyataannya konsep ini memiliki level lain yang dapat kita kenali dengan sebutan “Risalah Ibrahim” dan “Risalah Nuh”⁴. Konsep ini sebenarnya dapat diterima bukan hanya oleh kalangan umat Islam. Namun juga oleh kalangan Kristen, bahkan mereka yang sekuler sekalipun karena selama penyampaian konsep ini dibahasakan dengan cara yang mudah dimengerti oleh mereka.

4 Risalah Ibrahim adalah ajaran yang dianut oleh kaum Yahudi, Kaum Nasrani dan Umat Islam. Rsialah Nuh adalah pemahaman yang dianut oleh seluruh umat manusia di dunia ini yang percaya pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan dan kebenaran.

Keberadaan Hizbut Tahrir Di Kota Jambi

Hizbut Tahrir merupakan fenomena baru di kota Jambi walaupun di kota-kota besar lainnya Hizbut Tahrir sudah lama eksis, akan tetapi di kota Jambi baru ada pada bulan Agustus tahun 2006 (tidak ada kepastiannya tentang tanggal berdirinya (Agus, Wawancara: 23 September 2008).

Keberadaan Hizbut Tahrir menimbulkan diskusi yang panjang di kalangan akademisi kota Jambi baik di kalangan perguruan tinggi negeri seperti Unja maupun IAIN maupun perguruan tinggi swasta., diskusi tidak terbatas pada tahap teoritis – konseptual Hizbut Tahrir tetapi juga sampai pada tahap praktek dan realitas dari ide yang dilontarkan oleh tokoh Hizbut Tahrir.

Adanya organisasi ini sendiri yang bergerak di bidang intelektual dan politik tidak terlepas dari kaum perantauan yang datang ke kota Jambi, mereka pada umumnya telah mempelajari Hizbut Tahrir di tempat mereka menuntut ilmu sebagaimana yang dilontarkan oleh Yahman bahwa beliau mempelajari tentang konsepsi Hizbut Tahrir tentang khilafah semenjak kuliah di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (Yahman, Wawancara: 25 September 2003). Beliau datang ke Jambi tahun 2006 dan membawa ide-ide yang berkenaan Hizbut Tahrir ke kota Jambi. Namun, sebelum itu telah ada kader Hizbut Tahrir yang datang ke Jambi atau berdomisili di Jambi yaitu Husnul mempelajari Hizbut Tahrir bahkan semenjak sekolah di salah satu SMA di Pekan Baru (Husnul, Wawancara: 25 September 2008). Husnul sendiri berasal dari Kerinci salah satu kabupaten di Provinsi Jambi.

Setelah berkumpul beberapa orang yang memiliki ide yang sama atau semangat yang sama untuk mendirikan sistem khilafah dan menegakkan syariat Islam, maka pada bulan Agustus 2006 berdirilah Hizbut Tahrir cabang kota Jambi yang sekarang berkantor di perumahan Vila Safira (Rumah Dr. Andi).

Untuk saat ini keanggotaan Hizbut Tahrir di Kota Jambi belumlah signifikan, baru beranggota 15 orang. Akan tetapi bila dilihat dari gerakan yang dilakukannya sangatlah dinamis. Hal ini dikarenakan anggota-anggotanya terdiri dari kaum intelektual yang

berasal dari berbagai profesi dan latar belakang berbeda, seperti Yahman anggota KPU, Husnul pegawai kehutanan, dan Dr. Andi sendiri, dan lain-lain. Dengan anggotanya yang terdiri dari kaum intelektual, tentu saja membuat suatu gerakan akan cepat menyebar di kalangan masyarakat.

Sistem Rekrutmen Anggota

Hizbut Tahrir Kota Jambi merekrut anggotanya dengan cara sosialisasi. Karena masyarakat kota Jambi banyak yang belum kenal dengan Hizbut Tahrir dan program-programnya, maka anggotanya mengadakan sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Jambi. Ormas-ormas Islam, parpol, pihak pemerintah, kaum intelektual, mahasiswa yang ada di kota Jambi, Cara pelaksanaannya dengan melakukan peninjauan kepada pemerintah terlebih dahulu dan kaum intelektual mendukung dengan cara ikut mengopinikan ke tengah masyarakat keberadaan Hizbut Tahrir kota Jambi sebagaimana yang diakui Agus:

“Sebelumnya kami melakukan peninjauan terlebih dahulu kepada pihak eksekutif yang berkuasa saat ini, dan mendiskusikannya dengan kalangan intelektual kota Jambi (Agus, Wawancara: 23 September 2008).

Dipilihnya sosialisasi di kalangan intelektual dan tokoh masyarakat dan pemerintah dengan anggapan bahwa kaum intelektual akan gampang di ajak berdiskusi dan berargumentasi mengingat Hizbut Tahrir penuh dengan ide-ide yang sangat idealis. Selain itu, tokoh masyarakat memiliki power tersendiri di komunitas tempat ia berada sehingga diharapkan ketika sang tokoh tersebut sudah terlibat dalam Hizbut Tahrir maka yang lain akan mengikuti tokoh panutannya tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Husnul: “Selama ini kami melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang ada di kota Jambi. Hanya saja sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, akan tetapi usaha tetap terus dilakukan” (Husnul, Wawancara: 24 september 2008).

Selain itu sosialisasi yang dilakukan dengan cara mengadakan acara seminar bekerja sama dengan universitas yang ada di Kota

Jambi. Seperti yang dilaksanaka baru-baru ini. Seminar pendidikan yang bertemakan: “Menggagas sistem pendidikan unggul di tengah krisis pendidikan”. Acara seminar ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan Hizbut Tahrir cabang Jambi terhadap krisis pendidikan dengan segala aspeknya, mulai dari penyelenggaraan, kurikulum, maupun dari outputnya. Dari sisi penyelenggaraan dapat dilihat betapa minimnya fasilitas gedung, media pengajaran, dan juga nasib tenaga pegajarnya (guru). Dari sisi kurikulum dan outputnya dapat dilihat bahwa keluaran suatu perguruan tinggi tidak siap pakai, nilai moral yang rendah, dan daya inovasi yang rendah. Bahkandi negeri kaum Muslim terbesar di dunia ini, indeks pendidikan kita sangat rendah, nomor urut seratus lebih negara-negara di dunia da menjadi negara nomor satu dalam hal korupsi. Untuk meningkatkan sumber daya manusianya, Hizbuttahrir sebagai salah satu organisasi Islam yang hidup di tengah-tengah umat, merasa terpanggil untuk turut berkontribusi dalam upaya perbaikan bangsa, terutama dalam aspek pendidikan dan menggagas pendidikan unggul bagi anak bangsa. Seminar yang bertujuan untuk

1. Memberikan pemahaman mengenai pendidikan unggul.
2. Memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan unggul.
3. Strategi membangun Sistem pendidikan unggul.
4. solusi Islam dalam mengatasi sistem pendidikan.

Seminar ini diadakan pada tanggal 21 Juni 2008 dengan keynote speakernya adalah Rektor Unja dan menghadirkan DPP Hizbut Tahrir Indonesia Bapak Fahmi Lukman.

Sosialisasi dilakukan juga dalam bentuk penyebaran buletin dakwah al Islam yang terbit setiap Jum'at. Penyebaran buletin ini diperuntukkan bagi mahasiswa, kaum intelektual pemerintah dan tokoh masyarakat. Di dalamnya berisikan tentang konsep dan program hizbut Tahrir terutama dalam upaya menegakkan khilafah. Di samping itu juga berisikan promosi kegiatan yang dilakukan hizbut Tahrir cabang Jambi. Seperti kajian Islam Ahad Sore (KIAS) di mesjid Arraudhah Telanaipura Jambi dengan tema yang beragam. HT cabang Jambi juga mengadakan dialog interaktif pukul 20.00-

21—WIB setiap jumat malam dengan tema yang beragam pula. Hanya saja buletin ini sering kali tidak sampai ke pembacanya tepat waktu. Atau belum menyentuh hingga ke masyarakat awam. Hal ini diakui oleh Husnul sebagai pengelola buletin bahwa “ Kadang-kadang buletin tidak bisa disebarkan kemahasiswa dan masyarakat awam dikarenakan keterbatasan tenaga” (Husnul, Wawancara: 24 September 2008).

Untuk Muslimah, Hizbut Tahrir mengadakan dauroh muslimah berprestasi. Sebagaimana yang diadakan pada hari Sabtu dan ahad 26-27 Juli 2008. Daurah ini bermaterikan

1. Merubah paradigma, mengokohkan aqidah Islam
2. Menjadi muslimah berprestasi
3. Menjadi dan membentuk anak sholeh
4. pola relasi pria dan wanita dalam Islam
5. Mewaspadaai penghancuran keluarga muslim
6. Jalsa munnah

a. Peluang dan Hambatan

Untuk masyarakat kota jambi ada beberapa peluang yang bisa dilakukan oleh Hizbut Tahrir dalam rangka mengembangkan ide dan programnya. Pertama, di kota Jambi terdapat pemeluk Islam yang cukup banyak dari segi kuantitasnya yaitu 380 169. Jumlah ini memungkinkan bagi hizbut Tahrir untuk menambah anggotanya. Di samping itu terdapat 280 tempat ibadah umat Islam (Mesjid) yang selama ini menjadi tempat atau sentra pengajian dan diskusi Hizbut Tahrir. Andaikata semua mesjid tersebut dijadikan sebagai tempat diskusi secara bergiliran otomatis keanggotaan HT akan cepat bertambah.

Bila dilihat dari kualitas anggotanya, maka tidak diragukan lagi bahwa angota-anggota Hizbut Tahrir cabang jambi terdiri dari kalangan akademisi, propesional dan intelektual. Hal tersebut memungkinkan untuk mengembangkan hizbut tahrir dengan cepat di Kota Jambi.

Adapun kendala yang dihadapi sebagaimana diungkapkan oleh husnul adalah: “Keterbatasan jumlah anggotanya sekarang

ini mejadikan hizbut Tahrir tidak dapat disosialisasikan secara maksimal, sementara itu pihak pemerintah sendiri tidak sepenuhnya mendukung karena konsepnya berbeda dengan sistem pemerintahan sekarang ini (Husnul, Wawancara: 24 September 2008).

Tidak masuknya Hizbut Tahrir di dalam parlemen menjadi kendala tersendiri, karena sebagaimana diketahui bahwa parlemen (DPR) adalah sebagai pembuat UU dan yang mesyakkannya. Hizbut Tahrir sendiri menganggap bahwa parlemen tidak sesuai dengan ide Islam yatu ikhlas dan benar. Dengan demikian HT cabang jambi lebih memilih jalan umat (Husnul, Wawancara: 24 September 2008).

Respon masyarakat Kota jambi terhadap keberadaan Hizbut Tahrir

Pembicaraan tentang Hizbut Tahrir di Kota Jambi cukup menghangat akhir-akhir ini. Apalagi pasca diadakannya konferensi khilafah internasional 12 Agustus 2007. Hal ini terbukti pada skala nasional antusiasme berbagai kalangan untuk mengenal lebih dalam tentang khilafah dan HTI juga tampak ketika delegasi DPP HTI melakukan kunjungan silaturrahi ke sejumlah ormas, partai, dan media massa. Di jambi sendiri antusisme masyarakat terlihat ketika hizbut Tahrir mengadakan seminar pendidikan di auditorium UNJA Telanaipura Jambi. Acara tersebut diikuti oleh praktisi pendidikan, mahasiswa, pelajar, kalangan intelektual, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan serta masyarakat umum.

Untuk melihat respon masyarakat kota jambi, maka penulis mengkategorisasikan keterwakilan masyarakat dilihat dari profesi, tingkat umur, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Bila dilihat dari profesi, dari seratus angket yang disebarkan kepada para pedagang di kota jambi (Sektor perdagangan merupakan mata pencaharian yang banyak digeluti oleh masyarakat kota Jambi 36,28%, seratus persen menjawab ketidak tahuannya dengan keberadaan Hizbut Tahrir di Kota Jambi. Sebagian atau 50% menjawab pernah mendengar nama hizbut tahrir sedangkan sebagiannya lagi menjawab tidak pernah mendengarkan nama tersebut.

Demikian pula dengan para petani, dari seratus angket yang disebarakan menyebutkan tidak mengetahui keberadaan Hizbut Tahrir Kota Jambi, bahkan seratus persen tidak pernah mendengar nama Hizbut tahrir.

Dari kalangan yang berprofesi sebagai tukang ojek juga menyebutkan hal yang sama. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada salah seorang anggota hizbut Tahrir tentang ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan Hizbut Tahrir Husnul menjawab “ Bahwa sosialisasi yang dilakukan Hizbut Tahrir diperuntukkan bagi kaum intelektual terlebih dahulu karena mereka lebih gampang untuk diajak berdiskusi terutama berkaitan dengan konsepsi khilafah dalam Islam” (Husnul, Wawancara: 24 September 2008). Selanjutnya Agus menambahkan dengan dirangkulnya kaum intelektual diharapkan mereka dapat mengopinikan kepada masyarakat tentang keberadaan Hizbut Tahrir (Agus, Wawancara: 23 September 2008).

Akan tetapi akan terasa berbeda ketika ditanyakan kepada tokoh masyarakat dan kaum intelektual di kota Jambi tentang keberadaan hizbut tahrir. Dari seratus responden kaum intelektual semuanya menjawab mengetahui tentang keberadaan Hizbut Tahrir di kota Jambi bahkan mengetahui program dan ide yang diajarkan terutama tentang konsepnya mengenai khilafah Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hermanto Harun salah seorang pemerhati masalah sosial keagamaan di Kota Jambi “ Konsepsi khilafah hizbut Tahrir sangat idealis sekali dan sangat Islami. Akan tetapi sayangnya sangat matsali. Dari mana kita harus memulainya? Kita harus realistis melihat keadaan sosial di negara kita (Hermanto harun, Wawancara: 26 September 2008). Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang anggota MUI propinsi Jambi adrianus Khatib bahwa konsepsi khilafah yang diemban HT tidak realistis (Adrianus Khatib, Wawancara: 8 agustus 2008). Pendapat senada dilontarkan oleh Suaidi “ Akan sangat sulit untuk mencapai konsepsi yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir” (Suaidi Asyari, Wawancara: 6 Juli 2008). Begitu juga pendapat M Yusuf salah seorang dosen fakultas Adab “ Konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir terlalu susah untuk mewujudkannya” (M.Yusuf, Wawancara: 25 September 2008).

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada anggota Hizbut Tahrir dengan mengambil pertanyaan dari mana memulainya? Salah seorang anggota HT cabang Jambi menjawab "Kita harus memulainya dari sekarang. Masalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Apakah sepuluh tahun lagi, seratus tahun atau seribu tahun lagi. Yang penting kita telah melakukannya. Bisa jadi anak cucu kita nanti yang akan menikmatinya (Agus, Wawancara: 24 September 2008). Sikap optimis yang ditawarkan oleh kalangan Hizbut tahrir patut diacungi jempol karena akan menambah semangat mereka dalam berdakwah.

Sementara itu dari kalangan pemerintah juga menganggap ide yang dilontarkan oleh Hizbut Tahrir akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara nasionalpun sebenarnya HTI telah menjawab bahwa kurang tepat menganggap Hizbut Tahrir sebagai ancaman terhadap bangsa dan akan merusak keutuhan negara ini. Bagi Hizbut Tahrir keutuhan wilayah Indonesia adalah harga mati. Tidak boleh berkurang sedikit pun bahkan kalau bisa menambah wilayah (Al-Khatthath, 2007: 7).

Sistem khilafah sebagai suatu sistem pemerintahan (nizham al-hukm) merupakan sistem alternatif yang ditawarkan kepada bangsa dan negara ini untuk mengatasi berbagai krisis yang telah berlangsung sekitar sepuluh tahun dan belum kelihatan tanda-tanda membaik.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, seratus angket yang disebarakan kepada siswa SMU tidak ada satupun yang mengetahui tentang Hizbut Tahrir bahkan mendengar namanya saja tidak pernah. Hal ini tentu saja menjadi p[enomena tersendiri, karena salah seorang kader Hizbut Tahrir Kota Jambi (Husnul) sudah megenal Hizbut Tahrir semenjak menjadi siswa di salah satu SMA di Pekan Baru. Keadan menjadi berbeda ketika pertanyaan yang sama dilontarkan kepada mahasiswa. Mereka umumnya mengetahui tentang keberadaan Hizbut tahrir dan sebagian menganggap itu sebagai topik yang kurang menarik. Bahkan salah seorang mahasiswa ketika ditanyakan apakah Hizbut Tahrir dapat dikelompokkan sebagai ajaran yang radikal dan fundamentalis (Azra, 1996: 108).

Ia menolak mentah-mentah bila disebutkan HT sebagai ajaran yang radikal dan fundamentalis (Malik, Wawancara: 25 September 2008) karena pada hakekatnya program yang dilakukan HT banyak bersifat sosialisai dan tidak menjastifikasi.

Bila dilihat dari jenis kelamin, maka bisa dikatakan laki-laki lebih mengetahui keberadaan HT cabang Jambi dibandingkan kaum perempuan. Hal ini dimungkinkan karena terdapat hubungan tingkat pendidikan perempuan dan laki-laki di kota jambi. Dan kebanyakan kaum intelektual di Jambi adalah laki-laki. Dan juga partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kota Jambi tidak terlalu menggembirakan. Sedangkan Hizbut tahrir sendiri bergerak di bidang politik.

KESIMPULAN

Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya sebenarnya adalah tawaran alternatif bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami multi krisis. Sebagai gerakan politik Hizbut Tahrir sudah berdiri pada banyak negara di dunia Islam. Bahkan di Indonesia sendiri sudah terdapat 33 cabang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Kota Jambi.

Keberadaan Hizbut Tahrir di Kota Jambi dimulai pada bulan Agustus tahun 2006 yang dibawa oleh perantauan yang datang ke jambi dalam rangka melaksanakan pengabdian masyarakat serta terdiri dari berbagai kalangan seperti pegawai kantoran, dokter, mahasiswa, dan lain-lain. Keanggotaan Hizbut Tahrir sekarang ini belumlah signifikan (15 orang) untuk itu sosialisasi terus dilakukan dengan cara diskusi, seminar, penyebaran buletin, pengajian di mesjid-mesjid yang di ikuti berbagai kalangan.

Respon masyarakat sendiri terutama dari kalangan intelektual Jambi terhadap keberadaan Hizbut Tahrir di Kota Jambi dalam masalah khilafah belumlah disambut dengan baik. Karena sebagian besar kalangan beranggapan bahwa khilafah adalah sesuatu yang cenderung tidak realistis dan utopis. Adapun masyarakat awam sebagian besar belum mengetahui keberadaan Hizbut Tahrir di Kota Jambi. Untuk itulah sosialisasi harus terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Newell, *Accountability in The Khilafah*. (www.Khilafah.Com)
- Al-Harbutly, Ali Husni. *Al-Hadharah al-'Arabiyyah al-Islamiyah*, Maktabah al-Khaniji, Kairo, 1975.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidzam al-Islam* (Min Mansyurat Hizb al-Tahrir, 2001.
- Al-Faruqi dan Lamy al-Faruqi” The Cultural Atlas” The Hijrah 20-21
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989
- Assah, Ahmed. *Miracle of the Desert Kingdom*, Jhonson, London, 1996.
- Edward Mortimer, 1984. *Islam dan Kekuasaan*, Ensiklopedi Islam, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 2005.
- Enayat, Hamid. *Modern Islam Political Thought, the Respons of Syi'I and Sunni*, Terj. Asep Hikmat, Bandung Pustaka, 1988
- Hizb al-Tahrir, *al-Khilafah*, 2001
- Maarif, Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985
- Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Aplikasi*, Yayasan Asah, Asih, Asuh, 1990.
- Jalaluddin Rahmat, 1992, *Kepemimpina dalam Perspektif Syi'ah*, makalah.
- Munawir Sadzali, 1993. *Islam dan Tata Negara*, UI Pres: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Mun'im, 'Abd al-Majid. *Al-Hadharah al-Islamiyah fi 'Ushur al-Wustha*, Maktabah al-Anjalu al-Fikriyah, Kairo, 1987.
- Nasution, harun. *Pembaharuan dalam Islam, sejarah, pemikiran dan gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Sjazdali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1990

Majalah – Jurnal :

Al-Wa'ie, No. 83 Tahun VII, 2007

Al-Wa'ie, No. 85 Tahun VII, 2007

Al-Wa'ie, No. 87 Tahun VIII, 2007

Buletin al-Islam, Hizbut Tahrir

Nazharat, Vol. V, No. 2 Agustus 2006.

Yusuf Qardhawi,. *Kebangkitan Gerakan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003